

Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal



Ketua :

Dra. Mursyidah Dwi Hartati, SH, MH

Anggota :

Dr. Rahmad Agung Nugraha, S.Psi, M.Si

Dr. Suriswo, M.Pd.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Halmahera Km. 1 - Tegal 52122
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) 351082 / Rektor : Telp./Fax. (0283) 351267
e-mail : upstegal@gmail.com website : www.upstegal.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 007/K/A-4/LPPM-UPS/IX/2019

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal menugaskan kepada :

Nama : 1. Dra. Mursyidah DH, SH., MH
2. Dr. Rahmad Agung N, M.Pd
3. Dr. Suriswo, M.Pd

Jabatan : 1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tugas : Melaksanakan Penelitian dengan Judul:
"Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tegal"

Jangka Waktu : September 2019 – Agustus 2020

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tegal, 24 September 2019
Ka LPPM

Irfan Santoso, S.T., M.T
NIPY 17462161980

Yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan baik
Tegal,

.....

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tegal
2. Bidang Penelitian : Pendidikan
3. Ketua
 - a. Nama : Dra. Mursyidah Dwi Hartati, S.H M.H
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIPY : 10326121961
 - d. NIDN : 0626126101
 - e. Disiplin Ilmu : Pendidikan PPKn
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
4. Jumlah Anggota : 2 orang
 - Anggota 1
 - a. Nama : Dr. Rahmad Agung Nugraha, S. Psi, M.Si
 - b. NIDN : 06111077203
 - c. Disiplin Ilmu : Psikologi Pendidikan
 - Anggota 2
 - a. Nama : Dr. Suriswo M.Pd
 - b. NIDN : 0616036701
 - c. Disiplin Ilmu : Kurikulum dan Pembelajaran
5. Waktu : September 2019 – Agustus 2020
6. Lokasi : Kabupaten Tegal
7. Jumlah Biaya : Rp 13.000.000
8. Sumber Biaya : LPPM UPS Rp 10.000.000
Mandiri Rp 3.000.000

Tegal, Juni 2020

Ketua

Dra. Mursyidah D.H., S.H., M.H

NIPY.10326121961

Mengetahui,

Dekan FKIP UPS Tegal



Dr. Susongko M.Pd

NIPY.04171998021001

Menyetujui,

Kepala LPPM



Irfan Santosa S.T., M.T.

LPPM NIPY. 174621611980

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah SWT dan karuniaNya yang telah memberikan segalanya buat penulis sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih penulis tujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal , Para Informan yang telah membantu memberikan data dan segala keperluan yang penulis butuhkan hingga terselesaikannya penelitian ini , serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu. Semoga penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat Kabupaten Tegal dan para pembaca pada umumnya.

Tegal, Juni 2020

Dra. Mursyidah Dwi Hartati, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	6
A. Implementasi Kebijakan Publik	6
B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.....	10
1. Penguatan Pendidikan Karakter	10
2. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.....	14
3. Pelaksana Dan Tanggung Jawab.....	17
4. Pendanaan	20
BAB III Metode Penelitian.....	22
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	22
B. Fokus Penelitian	25
C. Pemilihan Informan.....	26
1. Informan	26
2. Teknik Pengambilan Informan	26
D. Metode Penelitian.....	27
E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	29
F. Analisis Data	31
G. Matrik Jadwal Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal	35
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian	36
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian Fenomena Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Tegal.	41

C. Analisis Hasil Penelitian	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
A. Simpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era teknologi saat ini memunculkan berbagai tatanan baru, ukuran ukuran baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi tantangan baru dalam pendidikan termasuk pendidikan nasional. Selain itu berbagai persoalan moral, budi pekerti, watak atau karakter seperti: meningkatnya dekadensi moral, meningkatnya ketidakjujuran pelajar, dan masih tingginya kasus tindakan kekerasan yang terjadi antar pelajar seperti klitih dan tawuran serta berbagai fenomena lain yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis moral.

Dari berbagai fakta tersebut menunjukkan masih banyak penyimpangan karakter yang terjadi. Padahal menurut Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan antara harapan dari pemerintah dengan

kenyataan yang terjadi pada karakter generasi bangsa karena masih banyak terjadi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa guru bimbingan dan konseling di Kabupaten Tegal menunjukkan fenomena-fenomena Fenomena jenis pelanggaran yang hampir setiap hari dilakukan oleh beberapa siswa SMA diantaranya terlambat masuk sekolah, bolos 5 sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, merokok di lingkungan sekolah, memakai seragam tidak lengkap atau tidak sesuai, mengompas dan melakukan perundungan (bullying) terhadap teman dan tidak mengerjakan tugas. Selain itu kasus kenakalan siswa SMA di kabupaten Tegal dikarenakan akibat permasalahan yang ada di dalam keluarga, seperti kebanyakan siswa-siswi berasal dari golongan keluarga yang kurang mampu, sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikis dalam diri siswa tersebut. Kebanyakan siswa berasal dari keluarga *broken home* (tidak utuh) dan biasanya siswa tinggal bukan dengan orang tuanya melainkan dengan nenek ataupun saudaranya yang menyebabkan siswa-siswi kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ketiga, Menurut pemaparan guru Bimbingan dan Konseling di beberapa SMA di Kabupaten Tegal menyatakan bahwa kebanyakan siswa laki-laki yang sering melakukan pelanggaran dibanding dengan siswa perempuan dengan adanya tawuran yang dilakukan oleh beberapa siswa serta pesta minuman keras

Dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan karakter, Oleh karena itu pendidikan Indonesia sangat perlu menjadi perhatian dari berbagai

pihak. Beberapa persoalan diatas menunjukkan bahwa ada kegagalan pada lembaga pendidikan dalam hal menumbuhkan manusia yang berkarakter. Padahal pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai krisis moral yang terjadi pada generasi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu menempatkan kembali penguatan pendidikan karakter sebagai poros pendidikan berdampingan dengan intelektualitas sangat penting dilakukan untuk mengatasi berbagai perilaku menyimpang generasi bangsa ini.

Selama ini pendidikan di sekolah hanya mengedepankan pencapaian akademik yang hanya membantu peserta didik menjadi cerdas dan pintar atau hard skill, dan sebaliknya kurang memperhatikan pendidikan karakter atau soft skill yang membantu mereka menjadi manusia yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ulangan atau hasil ujian yang menjadi patokan utama dalam menentukan kemampuan peserta didik. Padahal soft skill merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang sangat perlu diperhatikan.

Penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian tersebut mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill (goleman, 2001). Hal ini menunjukkan kesuksesan seseorang didasari oleh kemampuan soft skill yang memadai. Pendidikan karakter sebenarnya bukan sebuah kebijakan baru. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan budaya dan karakter

bangsa merupakan berbagai kebijakan yang menuntut pengembangan karakter dalam proses pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari penyusunan kebijakan program pendidikan karakter yang tidak berjalan dengan baik, kualitas sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Hasil belajar dalam hal ini nilai karakter yang tertanam dalam diri peserta didik sangat ditentukan oleh integrasi tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kualitas tenaga pendidik yang baik sangat menentukan keberhasilan pendidikan karakter. Kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya pendidikan karakter juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter khususnya peserta didik. Kesadaran peserta didik mengenai pentingnya nilai-nilai karakter tentu akan mempermudah proses penanaman nilai karakter tersebut.

Berdasarkan diskripsi latar belakang tersebut di atas, maka perlunya penelitian mengenai Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal, dengan judul penelitian : Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal
- 3) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang di lakukan untuk menunjang Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Purwanto dkk (2012), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut Agustino (2008), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2014) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (Winarno, 2014) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Thomas R. Dye (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (Agustino, 2008), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Budiadjo (Ali, dkk, 2012 : 12) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan –tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

W.I. Jenkins (Wahab, 2004) merumuskan kebijakan sebagai *“aset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Chief J.O. Udoji (Wahab, 2004 : 15), mendefinisikan kebijakan sebagai *“an sanctioned course of action addresses to a particular problem or group of related*

problems that affect society at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Shafritz dan Russell (Keban,2008) memberikan definisi bahwa kebijakan publik yaitu “*whatever a government decides to do or not to do*, sedangkan Chandler dan Plano berpendapat *public policy* adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya Paterson berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”, Paterson mengutip definisi kebijakan publik yang dikemukakan Anderson dan pendapat B.G. Peters.

Kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. Riant Nugroho Dwijiwijoto menyatakan “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. menyatakan implementasi kebijakan adalah penerapan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. (Alfatih, 2010)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Agustino, 2006) menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Van Meter Van Horn (Agustino, 2006) menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

- 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- 3) adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam

pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach (Agustino, 2006) melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut :
“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

1. Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi,

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan

c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
 2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Nonformal dan;
 3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Informal,
- b. pelaksana dan tanggungjawab
- c. pendanaan.

PPK dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan

- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:

- a. Intrakurikuler;
- b. Kokurikuler; dan
- c. Ekstrakurikuler.

Penyelenggaraan PPK dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru. Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formai dan guru dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan

untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal;
- dan
- c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan / lembaga lain yang terkait.

Lembaga lain yang terkait paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait harus mendapat rekomendasi dari kantor ke menterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang. Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan:

- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar

Komite Sekolah/Madrasah.

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya. Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

3. Pelaksana Dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- c) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- d) Pemerintah Daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:

- a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK;
- b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
- c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden'

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:

- a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di bawah kewenangannya;
- b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
- c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Agama bertanggung jawab untuk:

- a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya;

- b. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
- c. melakukan kerjasama antar kementerian/ lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk:

- a. mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam Penyusunan kebijakan' penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK;
- b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
- c. memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
- b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
- c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
- f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;
- g. dan melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

4. Pendanaan

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini. Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian

Pada hakikatnya rancangan penelitian merupakan penggambaran cara-cara yang akan dilakukan seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi. Tujuan dari penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial atau gejala sosial atau peristiwa sosial.

Dalam bagian ini diuraikan perspektif pendekatan kualitatif yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.

Penelitian kualitatif di mulai dengan pengumpulan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat (*common sense*) manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum pengumpulan data (informasi) akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data (informasi) yang dikumpulkan terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku atau kegiatan yang tampak. Informasi itu dipelajari dan ditafsirkan dengan usaha memahami

maknanya sesuai dengan sudut pandangan sumber datanya. Makna informasi-informasi yang bersifat khusus itu dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sumber data dalam kondisi sewajarnya (natural setting).
2. Penelitian tergantung pada kemampuan peneliti dalam mempergunakan instrumen (alat) yang tidak merubah situasi sewajarnya, menjadi situasi yang berbeda dari yang berlangsung sehari-hari di lingkungan sumber datanya. Untuk itu peneliti harus memahami makna yang tampak dalam setiap tingkah laku atau penampilan sumber data yang terdiri dari manusia.
3. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif.
4. Dalam penelitian kualitatif, baik proses maupun hasilnya sama pentingnya. Proses penelitian penting artinya dalam memberikan keyakinan pada tingkat validitas, reliabilitas dan obyektivitas hasil penelitian. Sedang hasil penelitian penting artinya dilihat dari bobotnya dalam pengembangan disiplin ilmu atau kemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Hasil yang berbobot hanya akan diperoleh melalui proses penelitian yang dapat dipercaya.
5. Analisis data dilakukan terus menerus sejak awal dan selama proses berlangsung.
6. Bertolak dari masalah penelitian yang bersifat umum, dan bahkan tidak mustahil masih sekedar berbentuk gambaran umum yang belum jelas,

berarti pada awal penelitian belum dimiliki desain (rancangan) yang definitif dan sistematis (Nawawi, 1992)

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan pertimbangan :

- 1) Penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang *holistik* (menyeluruh) dalam menganalisis suatu fenomena
- 2) Penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kuantitatif deskriptif, dengan secara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya bahwa data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi (Vredenberg, 1983)

Selain itu juga menurut Gempur Santosa (2005) penggunaan penelitian kualitatif mempunyai keunggulan yaitu rasionalisasi atas data empiris yang ada dapat mendalam, karena tidak terbatas pada paradigma teori tertentu, dengan demikian temuan bukan sekedar verifikasi teori tertentu, tetapi dapat menemukan yang baru.

Lebih lanjut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1997) menyebutkan Penelitian metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik menggunakan metode deskriptif kompleks sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai realitas.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Moleong (1997)

yang mana menyatakan bahwa penelitian / metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan realita secara jelas dan terperinci mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal

B. Fokus Penelitian

Walaupun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif namun masih diperlukan fokus penelitian, karena dapat digunakan sebagai wahana untuk membatasi studi. Penentuan ruang lingkup atau fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian agar terhindar dan tidak terjebak pada pengumpulan data untuk bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian, sebab tujuan penelitian ini yang menjadi pokok, tetapi fokus dapat berkembang sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang fleksibel dimana pengumpulan data lapangan mampu mencerminkan kondisi sebenarnya, karena penelitian ini adalah deskriptif, maka peneliti tidak menghubungkan faktor atau variabel satu dengan variabel yang lain, tetapi hanya ingin mengetahui masing-masing variabel secara lepas (Suharsimi Arikunto, 2003:310) oleh karena itu, mengacu pada uraian perumusan masalah

maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal

C. Pemilihan Informan

1. Informan

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sebagai informan adalah para maka informan yang akan dipilih diantaranya adalah antar satuan pendidikan formal; antar satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan nonformal; dan antar satuan pendidikan formal dengan lembaga keagamaan / lembaga lain yang terkait meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait di Kabupaten Tegal

2. Teknik Pengambilan Informan

Mengingat metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi maksud sampling dalam hal ini untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructional*) Maksud kedua dari sampling ialah menggali

informasi yang akan menjadi dasar dan rancangan serta teori yang muncul. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*puposive sample*) Moleong (1999).

Oleh karena itu pemilihan informan sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria.

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai (telah cukup). Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik komunikasi langsung dan observasi (pengamatan) baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan teknik observasi ini, hal yang sering dipergunakan adalah pencatatan dengan berbagai bentuk/jenisnya misalnya laporan dan dokumen.

Agar dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat penelitian sesuai dengan metode penelitian

yang dipilih. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrument utama penelitian.

Menurut Usman dan Akbar (1996) bahwa peneliti merupakan instrument kunci dalam pengumpulan data. Dengan demikian peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif, mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasikan dari pernyataan dan perilaku informan. Seperti telah disebutkan bahwa tujuan penelitian kualitatif bersifat mendiskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, oleh sebab itu instrument diperlukan karena peneliti dituntut dapat menemukan data yang diangkat dari fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti dalam melaksanakan penelitiannya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur, meskipun tidak terstruktur tetapi peneliti menggunakan “pedoman“ pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, yang juga disebut *interview guide*.

Sebagai informan utama dalam penelitian, peneliti juga menggunakan alat bantu guna melengkapi proses pengumpulan informasi. Alat bantu penelitian tersebut antara lain pedoman wawancara, buku catatan, perekam suara serta foto dokumentasi untuk dapat menjangkau informasi dengan lebih lengkap dan efektif.

E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian.

Data primer melalui observasi dan wawancara dengan antar Satuan pendidikan formal, antar satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan nonformal dan antara satuan pendidikan formal dengan lembaga keagamaan / lembaga lain yang terkait dijadikan informan untuk mendapatkan keterangan secara lisan pemahaman, pendapat dan keterlibatannya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pendekatan *snow ball*, dimana peneliti memilih seseorang yang akan dijadikan informan, dari informasi yang diperoleh tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke informan-informan lain sampai keterangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sudah dirasa memenuhi.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dilaksanakan melalui komunikasi dua arah dengan informan berdasarkan acuan daftar pertanyaan tipe terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dilanjutkan dengan wawancara lebih mendalam (*depth interview*) dimaksudkan karena wawancara yang

digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2. Observasi. Pengamatan secara seksama untuk memperoleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian.

Data penelitian kualitatif ini merupakan data material mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan atau rekaman, data ini kemudian diklasifikasi sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data dan diakumulasi menjadi sesuatu yang bermakna sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data tersebut.

Untuk memperoleh data yang aktual, akurat dan relevan dilakukan dengan kegiatan observasi/pengamatan maupun wawancara langsung kepada para informan yang telah dipilih dan mempelajari dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hal ini sesuai pendapat Faisal (1990) penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan observasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber non manusia (*non human source of information*), seperti dokumen dan rekaman/catatan (*record*) yang tersedia.

Dalam melakukan observasi/pengamatan peneliti langsung mengamati kejadian atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal. Kemudian dalam melaksanakan wawancara peneliti

menanyakan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu dalam wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu formal, namun diusahakan bisa menggiring informan agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Dengan melakukan wawancara yang baik akan diperoleh suatu masukan data yang kongkrit tentang obyek penelitian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dalam hubungan ini yang banyak diserap adalah dokumen yang bersifat internal, meliputi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter.

F. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori, data hanya bermakna jika dianalisis secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Dalam analisis data peneliti dilibatkan sedemikian rupa agar kesimpulan dan keputusan dapat dirumuskan secara baik dan benar. Analisis data merupakan proses pendiskripsian dan penyusunan transkrip interview terkait data yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan (Danim, 2002).

Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian mengenai berbagai gejala atau

kasus yang dapat diuraikan dengan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan dan penjelasan. Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, pengklasifikasian data kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis domain, dengan tujuan menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relative utuh tentang obyek penelitian tersebut. Artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang berbagai domain atau konseptual (katagori simbolis yang mencakup sejumlah katagori lain secara tertentu) dari obyek yang diteliti tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut (Bungin. 2002)

Sementara menurut Danim (2002) dengan menggunakan analisis domain, maka data dari hasil penelitian dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Mendata data yang diperoleh di lapangan
2. Mengklasifikasikan data, data direkonstruksi atau dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kedekatan data
3. Pengkodean data/pemberian kode, hal ini dimaksud untuk memilah data deskriptif yang telah terkumpul

4. Kodifikasi, yaitu membuat daftar dan memberikan tanda untuk setiap unit.

Hal ini bertujuan memutuskan untuk memasukkan suatu data dalam suatu katagori agar tidak tumpang tindih.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui berbagai variabel yang dijadikan ukuran sebelumnya untuk mengetahui secara pasti Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal.

Metode kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengorganisasian data yang dikumpulkan yang terdiri atas catatan, komentar dan informan lapangan, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya. Analisis dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai penelitian berakhir (Nasution, 1988). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan Nasution (1988) dan Miles & Humberman (1992), melalui prosedur reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Ketiga proses tersebut dilakukan secara bersama-sama, selama penelitian dilakukan.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk

uraian atau laporan rinci. Dalam penulisan data selalu diadakan analisis melalui reduksi, rangkuman, pemilihan pokok-pokok permasalahan yang penting, menyusunnya secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah peneliti mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan, disamping itu reduksi data dapat pula membantu peneliti memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display data /sajian data;

Membuat perbandingan-perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menemukan *general design* yang diperoleh dari sekumpulan data tebal, menyusunnya dalam kategori-kategori inti melalui penyeleksian data secara ketat. Dari data yang telah direduksi di atas disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Verifikasi data

Dalam proses verifikasi data selalu diupayakan mencari makna, mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dari setiap data yang diperoleh. Data dari lapangan kemudian disajikan melalui reduksi data maupun verifikasi yang bersifat sementara. Kemudian diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain dan dilakukan distorsi sehingga menghasilkan proposi-proposisi yang merupakan konsep-konsep sebagai embrio terbentuknya teori.

G. Matrik Jadwal Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal

Rincian Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan dari mulai bulan September 2019- Maret 2020 dengan rincian kegiatan sebagai berikut.:

Kegiatan	Bulan (Tahun 2019)				Bulan (Tahun 2020)		
	Sept	Okto	Nov	Des	Janu	Febr	Maret
Persiapan survei awal sampai penyusunan proposal							
Penyiapan instrumen dan alat							
Pelaksanaan kegiatan							
Evaluasi							
Penyusunan laporan							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.

Secara astronomis, Kabupaten Tegal terletak antara 1080 57' 6" – 1090 21' 30" Bujur Timur dan 60 50' 41" - 7 0 15' 30" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tegal memiliki batas batas sebagai berikut : Utara – Kota Tegal dan Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas; Barat – Kabupaten Brebes; Timur – Kabupaten Pemalang. Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan dan secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu :

- a. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja;
- b. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- c. Daerah dataran tinggi/Pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (BPS Kabupaten Tegal, 2019).

Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 Kecamatan, 287 Desa/Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas-batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal (BPS Kabupaten Tegal, 2019).

Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pembinaan terhadap UPTD di di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Program, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pendataan dan Informasi;
 - 2) Seksi Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
 3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kependidikan SD;
 - 2) Seksi Kependidikan SMP;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

2) Seksi Sejarah dan Tradisi;

3) Seksi Kesenian.

5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Nonformal, & Informal;

2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

d. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, terdiri dari :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan; dan Review Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

2. Sub bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Adapun jumlah SMA di kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

No	Nama sekolah	Status	Alamat	Lokasi
01.	SMAN 1 BALAPULANG	NEGERI	JL. DESA BANJARANYAR	KEC. BALAPULANG
02	SMAN 1 BOJONG	Negeri	JL. RAYA TUWEL- BOJONG	KEC. BOJONG
03	SMAN 1 DUKUHWARU	Negeri	JL. PRAMUKA NO. 48 DUKUHWARU	KEC. DUKUHWARU
04	SMAN 1 KRAMAT	Negeri	JL. GARUDA NO. 1a BONGKOK, KRAMAT	KEC. KRAMAT
05	SMAN 1 MARGASARI	Negeri	JL. RAYA KESAMBI	KEC. MARGASARI

			PRUPUK-MARGASARI	
06	SMAN 1 PAGERBARANG	Negeri	JL. RAYA PAGERBARANG - MARGASARI	KEC. PAGERBARANG
07	SMAN 1 PANGKAH	Negeri	JL. RAYA KALIKANGKUNG-PANGKAH	KEC. PANGKAH
08	SMAN 1 SLAWI	Negeri	JL. KH. WAHID HASYIM NO. 1 SLAWI	KEC. SLAWI
9.	SMAN 1 WARUREJA	Negeri	JL. AMD 4 WARUREJA	KEC. WARUREJA
10	SMAN 2 SLAWI	Negeri	JL. RA. KARTINI PO. BOX 22 SLAWI	KEC. SLAWI
11	SMAN 3 SLAWI	Negeri	JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI	KEC. SLAWI
12	SMAS AL MUAWANAH LEBAKSIU	Swasta	JL. DESA HARJAWINANGUN	KEC. BALAPULANG
13	SMAS BHAKTI PRAJA ADIWERNA	Swasta	JL. SINGKIL NO. 242 ADIWERNA	KEC. ADIWERNA
14	SMAS DARUU ULIL AL BAAB WARUREJA	Swasta	JL. PESANTREN NO. 01 WARUREJA	KEC. WARUREJA
15	SMAS DIPONEGORO LEBAKSIU	Swasta	JL. RAYA DUKUHLO NO. 1	KEC. LEBAKSIU
16	SMAS MA'ARIF LEBAKSIU	Swasta	JL. DUREN SAWIT KESUBEN, LEBAKSI	KEC. LEBAKSIU
17	SMAS MA'ARIF NU JATINEGARA	Swasta	JL. RAYA TIMUR JATINEGARA	KEC. JATINEGARA
18	SMAS MUHAMMADIYAH MARGASARI	Swasta	JL. KERANDAN NO. 1 MARGASARI	KEC. MARGASARI

19	SMAS MUHAMMADIYAH SURADADI	Swasta	JL. RAYA SURADADI KM 16 TEGAL	KEC. SURADADI
20	SMAS MUHAMMADIYAH TARUB	Swasta	JL. RAYA BALAMOA BANJAWARU, TARUB	KEC. TARUB
21	SMAS NU 01 HASYIM ASY'ARI TARUB	Swasta	JL. RAYA KARANGJATI NO. 25	KEC. TARUB
22	SMAS NU 01 PENAWAJA ADIWERNA	Swasta	JL. S. AMANGKURAT I ADIWERNA	KEC. ADIWERNA
23	SMAS NU 01 SURADADI	Swasta	JL. RAYA SURADADI KM. 17 TEGAL	KEC. SURADADI
24	SMAS NU 01 WAHID HASYIM TALANG	Swasta	JL. PROJOSUMARTO II PESAYANGAN	KEC. TALANG
25	SMAS PGRI SLAWI	Swasta	JL. SUPRIYADI TRAYEMAN	KEC. SLAWI

B. Hasil Penelitian

Fenomena Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah

hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Setelah dilakukan penelitian lapangan, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terdiri dari beberapa Guru, Guru Koordinator Bimbingan Konseling, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal. Salah satu upaya pemerintah tentang pendidikan karakter adalah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap dan bertindak menjadi lebih baik

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi adanya komunikasi, dimana pengertian komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain dan Komunikasi merupakan suatu peralatan manajemen yang dirancang untuk mencapai tujuan dan tidak dinilai atas hasil akhir dalam komunikasi itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Setelah dilakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari para stake holder pendidikan di kabupaten Tegal yang terdiri dari para pendidik, tokoh masyarakat, dan masyarakat kabupaten Tegal. Informan tersebut adalah :

1. Ibu Dra. Eko Bayuwati
2. Bapak Fatchudin
3. Ibu Molek Yuniarti
4. Ibu Ani Usdiyati
5. Bapak Faizin Rofiq, S.Pd
6. Bapak Akhmad Faojan

Secara keseluruhan mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Tegal, informan memberikan keterangan ketika diwawancarai oleh peneliti tentang bagaimanakah sosialisasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal yang telah dilaksanakan dan harapan-harapan apa yang diperlukan untuk selanjutnya.

Ibu Eko Bayuwati seorang Guru Koordinator Bimbingan dan Konseling mengatakan bahwa :

” sosialisasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal, sosialisasi tersebut diterima secara positif di sekolah kami. Harapan harapan yang diperlukan untuk selanjutnya yaitu antara lain untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati, (etik dan spiritual), olah rasa (estetik),

olah pikir (literasidan numerasi) dan Olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sedangkan bapak Akhmad Faojan seorang Guru dan para informan lainnya memberikan komentarnya bahwa sosialisasi berjalan dengan lancar cukup baik dengan harapan perlunya motivasi para guru tentang pendidikan karakter dan perlunya adanya evaluasi keberhasilan pendidikan karakter. Ibu MY menambahkan bahwa perlunya keterlibatan orang tua, masyarakat dan lingkungan untuk bisa memberi keteladan dalam pembentukan karakter tidak hanya diserahkan sepenuhnya dilingkungan sekolah saja. Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab siswa dan tenaga kependidikan saja melainkan dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah yang harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam dunia pendidikan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak yang lahir sejak awal kehidupannya, dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan.

Peran para guru, kepala sekolah, Tokoh masyarakat dan stake holder terhadap Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal menurut para informan kebanyakan mengatakan bahwa semua sangat bertanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu munculnya suatu kebijakan mengenai pendidikan , dalam hal ini kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter dapat diketahui strategi apa yang akan

dilakukan oleh Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan. Sedangkan Bapak Akhmad Faojan seorang informan mengatakan Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal belum maksimal sehingga perlu dipertanyakan mengenai kinerja Dinas Pendidikan selama ini, apakah masyarakat dan tenaga pengajar merasa terlayani dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Disisi lain semua informan menyatakan bahwa Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal sudah berjalan sesuai dengan aturan.

Sedangkan program-program lain yang mendukung Kebijakan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal sangat diperlukan menurut informan, program program tersebut adalah lebih ke arah program kesiswaan, program melaksanakan ibadah, bela negara dan lain-lain.

Dilihat dari tingkat pendidikan formal di sekolah atau Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dari hasil wawancara semua informan di dapat keterangan bahwa semua itu sudah terdapat di matapelajaran di sekolah sekolah dan kondisi sekarang ini mengalami kemajuan di kabupaten Tegal. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempatkan pendidikan karakter sebagai poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Kedepan diharapkan Penguatan Pendidikan Karakter agar dapat mengintegrasikan, memperdalam, memperluas dan menyelaraskan program kegiatan pendidikan karakter. Dalam konteks ini pengintegrasian yang dimaksud

berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah dan di luar sekolah serta pemaduan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Perdalam dan perluasan yang dimaksud dapat berupa penambahan kegiatan yang mengacu kepada pengembangan karakter siswa secara intensif serta pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah. Dan yang terakhir adalah penyelarasan dimana berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah dan fungsi komite sekolah dengan kebutuhan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal.

Seiring diberlakukannya kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter, ada berbagai macam respon dari pihak sekolah maupun orang tua murid, ada yang sangat mendukung dan ingin menerapkan tetapi ada juga beberapa sekolah yang kurang setuju. Memang kebijakan tersebut boleh dilaksanakan boleh tidak tetapi lebih baik lagi untuk diterapkan, maka dari itu pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal pada setiap tahun tidak berani untuk memasang target karena hal tersebut dilakukan secara bertahap dengan melalui beberapa proses.

Mengenai Manfaat Pendidikan Karakter dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 memberikan manfaat, manfaat tersebut adalah :

1. Dalam Lingkungan Keluarga.
 - a. Anak akan menjadi Pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua atau Berbakti kepada kedua Orang Tua.
 - b. Membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga (bagi kepala keluarga).

2. Dalam Lingkup Sosial (masyarakat)

- a. Anak akan memiliki hubungan yang baik antar Tetangga, Tenggang Rasa atau Tepo Sliro
- b. Anak akan memiliki Jiwa sosial yang baik, Ringan tangan atau suka memberikan bantuan kepada warga yang kekurangan.
- c. Anak akan Percaya diri untuk Tampil aktif dalam Organisasi kemasyarakatan.

3. Dalam Lingkungan Pemerintahan (Pengabdian kepada Negara)

- a. Jika Bekerja sebagai pegawai Negeri di harapkan menjadi pagawai yang Amanah, tidak menyeleweng jabatan terlebih lagi melakukan korupsi.
- b. Jika dipercaya Oleh rakyat, Seperti anggota DPR/MPR akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukannya memperjuangkan kepentingan pribadi. seperti potret bangsa kita saat ini bayak anggota Dewan yang terlibat kasus suap dan Penggelapan Dana.
- c. Jika di Percaya Jadi Pemimpin Diharapkan menjadi pemimpin yang adil, memperjuangkan hak hak rakyat kecil. Dan yang paling penting menjadi pemimpin yang bisa menegakkan keadilan di Negeri ini, Karena krisis kepercayaan di negeri ini sudah hampir musnah, Karena hukum di negeri ini berlaku terbalik yaitu Tajam Kebawah dan Tumpul Keatas.

Semua informan menyatakan bahwa selama ini belum ada tim pengembang/tim khusus dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal, yang ada adalah dilakukan oleh

guru mata pelajaran sendiri, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam mengembangkan kurikulum dan kepala sekolah beserta guru BK yang ada di kabupaten Tegal dalam mengidentifikasi berbagai potensi sekolah dalam merumuskan program penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal.

Berbagai kondisi di Indonesia menunjukkan krisis moral bangsa saat ini yang memprihatinkan. Krisis moral terjadi pada semua golongan usia dan semua lini bangsa. Tidak jarang kita mendengar berbagai berita di media massa atau di lingkungan masyarakat mengenai berbagai kasus, baik orang maupun sekelompok orang yang menyimpang dari nilai moral dan etika bangsa yang bermartabat. Hal tersebut diperkuat dengan temuan berbagai data mengenai kasus seperti pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, aborsi, dan korupsi yang semakin meningkat. Untuk itu nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam berbagai program penguatan pendidikan Di kabupaten Tegal menurut para Informan adalah sebagai berikut :

- a. Religius
- b. Jujur
- c. Toleransi
- d. Disiplin
- e. Kerja Keras
- f. Kreatif
- g. Mandiri

- h. Demokratis
- i. Rasa Ingin Tahu
- j. Semangat Kebangsaan
- k. Cinta Tanah Air
- l. Menghargai Prestasi
- m. Bersahabat/ Komunikatif
- n. Cinta Damai
- o. Gemar Membaca
- p. Peduli Lingkungan
- q. Peduli Sosial
- r. Tanggung Jawab

Pada dasarnya pendidikan formal di sekolah akan sangat membantu jika pihak sekolah menekankan pada pendidikan yang membentuk karakter anak. Seiring dengan lunturnya nilai moral di masyarakat saat ini membuat sekolah harus dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan memperbanyak program pendidikan karakter. Menurut Hamid (2017) Sekolah (pendidikan) merupakan salah satu tempat yang strategis dalam pembentukan karakter selain di keluarga dan masyarakat. Hal itulah yang mendasari perlu adanya program pendidikan karakter di sebuah sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari itu perlu penanaman pendidikan karakter untuk tiap sekolah dengan berbagai kegiatan yang bisa menunjang penanaman karakter yang baik ini. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan dan menanamkan nilai-nilai

karakter adalah dengan kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Karena memang hal yang rutin dilakukan setiap hari akan tertanam dengan baik dalam diri peserta didik maupun warga sekolah yang lain. Maka dari itu kegiatan pembiasaan ini menjadi kegiatan yang sangat penting bagi terlaksananya pendidikan karakter yang ada di sekolah. Seperti yang dijabarkan oleh Wibowo (2013) bahwa “Nilai-nilai pendidikan karakter juga harus ditumbuhkan lewat kebiasaan kehidupan keseharian di sekolah (habitiasi), melalui budaya sekolah karena budaya sekolah (school culture) merupakan kunci dari keberhasilan pendidikan karakter itu sendiri”.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan mengacu perumusan masalah dan fokus penelitian yaitu Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal dapat diketahui bahwa sosialisasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal, sosialisasi tersebut diterima secara positif dan lancar sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan harapan yang diperlukan untuk selanjutnya yaitu antara lain untuk memperkuat karakter siswa

melalui harmonisasi oleh hati, (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan Olah raga (kinestetik).

Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal Masih perlunya keterlibatan orang tua, masyarakat dan lingkungan untuk bisa memberi keteladanan dalam pembentukan karakter tidak hanya diserahkan sepenuhnya dilingkungan sekolah saja.

Sedangkan program-program lain yang mendukung Kebijakan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal sangat diperlukan menurut informan, program program tersebut adalah lebih ke arah program kesiswaan, program melaksanakan ibadah, bela negara dan lain-lain.

Dilihat dari tingkat pendidikan formal di sekolah atau Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dari hasil wawancara semua informan di dapat keterangan bahwa semua itu sudah terdapat di mata pelajaran di sekolah sekolah dan kondisi sekarang ini mengalami kemajuan di Kabupaten Tegal. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempatkan pendidikan karakter sebagai poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Kedepan diharapkan Penguatan Pendidikan Karakter agar dapat mengintegrasikan, memperdalam, memperluas dan menyelaraskan program kegiatan pendidikan karakter. Dalam konteks ini pengintegrasian yang dimaksud berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah dan di luar sekolah serta pemaduan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Perdalam dan perluasan

yang dimaksud dapat berupa penambahan kegiatan yang mengacu kepada pengembangan karakter siswa secara intensif serta pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah. Dan yang terakhir adalah penyesuaian dimana berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah dan fungsi komite sekolah dengan kebutuhan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal.

Seiring diberlakukannya kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter, ada berbagai macam respon dari pihak sekolah maupun orang tua murid, ada yang sangat mendukung dan ingin menerapkan tetapi ada juga beberapa sekolah yang kurang setuju. Memang kebijakan tersebut boleh dilaksanakan boleh tidak tetapi lebih baik lagi untuk diterapkan.

Mengenai Manfaat Pendidikan Karakter dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 di Kabupaten Tegal memberikan manfaat walaupun belum ada tim pengembang/tim khusus dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal, yang ada adalah dilakukan oleh guru mata pelajaran sendiri, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam mengembangkan kurikulum dan kepala sekolah beserta guru BK yang ada di kabupaten Tegal dalam mengidentifikasi berbagai potensi sekolah dalam merumuskan program penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam berbagai program penguatan pendidikan Di kabupaten Tegal adalah nilai karakter religious, Jujur, toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,

Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air,
Menghargai Prestasi, Bersahabat/ Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca,
Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian dalam Bab V ini, peneliti menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal dan faktor apa saja pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal.

Pendidikan karakter bukan saja menjadi tanggung jawab siswa dan tenaga kependidikan saja melainkan dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah yang harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan karakter. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan karakter yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak yang lahir sejak awal kehidupannya, dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakekatnya, pendidikan karakter memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 2045, pemerintah

menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jenjang Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berada di bawah kewenangan Kabupaten Kota, sebelumnya hanya mengurus Sekolah Dasar saja. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004, semua tingkatan sekolah masih di dalam kewenangan Kabupaten Kota. Kewenangan tersebut berubah disaat adanya perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014, dimana kewenangan pada tingkatan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa berada pada bagian urusan Daerah Provinsi meninggalkan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di Kabupaten Kota sehingga dalam

Adapun factor factor pendukung dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal sudah berjalan sesuai dengan aturan.
2. Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas sudah terdapat di matapelajaran di sekolah sekolah dan kondisi sekarang ini mengalami kemajuan di kabupaten Tegal, hal ini menunjukkan bahwa gerakan Penguatan Pendidikan Karakter menempatkan pendidikan karakter sebagai poros pelaksanaan pendidikan dengan harapan dapat mengintegrasikan,

memperdalam, memperluas dan menyelaraskan program kegiatan pendidikan karakter.

Sedangkan factor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya respon dari pihak sekolah maupun orang tua murid yang kurang setuju tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal pada setiap tahun tidak berani untuk memasang target karena hal tersebut dilakukan secara bertahap dengan melalui beberapa proses.
3. belum ada tim pengembang/tim khusus dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal.

B. Saran

Saran-saran yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam penelitian Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Tegal ini , yaitu saran yang ditujukan kepada dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Masyarakat dan kepada peneliti selanjutnya, sebagai hasil pemikiran peneliti atas keterbatasan penelitian ini.

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal

1. Mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

2. Membentuk tim pengembang/tim khusus dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal,
3. Memfasilitasi dan melayani dengan baik dan merata dalam mengembangkan pendidikan karakter yang dirasa kurang khususnya pada masyarakat dan tenaga pengajar Dalam Melaksanakan Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter.
4. Selalu mengevaluasi dan ada target khusus pada setiap tahun dalam mengembangkan pendidikan karakter sehingga melalui sekolah dan para guru dapat meningkatkan kesadarannya dan kepeduliannya kepada peserta didik sehingga bisa berkomitmen dalam pendidikan karakter.

B. Masyarakat Kabupaten Tegal khususnya para orang Tua

1. Menempatkan tugas dan kewajiban ayah dan ibu sebagai agenda utama. Hal ini dilakukan melalui perencanaan dan pemberian waktu yang cukup untuk tugas ayah dan ibu dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas utama; Mengevaluasi cara orang tua dalam
2. Menghabiskan waktu selama sehari dalam seminggu. Orang tua harus memikirkan penggunaan waktu luang yang secara khusus diberikan untuk keluarga
3. Menyiapkan diri menjadi contoh yang baik. Hal ini merupakan kegiatan penting karena anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya melalui proses imitasi dan identifikasi.
4. Bersikap terbuka dan menjaga terhadap apa yang diserap dan dialami

anak. Hal ini karena anak akan belajar dari semua hal yang dia alami, berbagai media seperti buku, televisi, games, koran, majalah, alat

5. Terlibat dalam kehidupan sekolah anak. Selama di sekolah anak berpisah dengan orang tuanya. Dia akan mengalami berbagai pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, orang tua perlu membantu anak untuk bersiap menghadapi semuanya

C. Bagi Peneliti Lain atau Peneliti Selanjutnya

1. Agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan lebih bisa dikembangkan dengan topik-topik yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*, Cetakan sebelas, penerbit Rineka Cipta Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- , 2006,. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter VanHorn: The Policy*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2019. *Kabupaten Tegal Dalam Angka*
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung.
- Goleman, Daniel. 2001. *Kecerdasan Emosional: Mengapa EI lebih penting daripada IQ*, terj. T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gelinas, Ulrich & Dull , B. Richard, 2012. *Accounting Information Systems, 9th ed.* South Western Cengage Learning. 5191 Natorp Boulevard Mason, USA. P. 19
- Hamid, A. 2017. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren: Pelajar dan Santri dalam Era IT & Cyber Culture*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Kusuma, Doni A. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasndo.
- Kencana, Syafiie Inu, *Sistem Politik Indonesia*, refika aditama, Bandung, 2006.

- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1991, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasir, Moh, 1999, Metode Penelitian, Edisi keempat, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik - Kualitatif, Tarsito, Bandung
- Nawawi, H. Hadari dkk, 1992, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Cetakan I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Romney, Marshal B., dan Steinbart, Paul John. 2015 . “*Accounting Information Systems*”. USA: Cengage Learning.
- Satzinger, Jhon W., Jackson, Robert B. dan Burd, Stephen D. (2009). System Analysis And Desig In A Changing World. Course Technology. USA
- Santoso, Gempur , 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ,Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta
- Sistem Informasi Partai Politik (SISPOL). <http://www.tribunnews.com/tag/sistem-informasi-partai-politik-sipol>
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1998. Metodologi Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta
- Subarsono AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Stair, Ralph M., dan Reynolds, George W. 2012. “Fundamentals of Information Systems (With Access Code)”. USA: Cengage Learning.
- Nugroho Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Gramedia, Jakarta

Vredentbergt, 1993, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, rajawali Press, Jakarta.

Wibowo, A. 2013. Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta Penerbit Media Pressindo.

INTERVIEW GUIDE

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Alamat :

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah sosialisasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal yang telah dilaksanakan, harapan-harapan apa yang diperlukan untuk selanjutnya ?
2. Menurut pendapat saudara, bagaimana pelaksanaan program Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal ?
3. Sejauh manakah peran para guru, kepala sekolah, Tokoh masyarakat dan stake holder terhadap Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dan Bagaimana proses sosialisasi program penguatan pendidikan karakter kepada pemangku kepentingan pendidikan (orangtua, guru, siswa, dan lain-lain) Di Kabupaten Tegal?

4. Yang anda ketahui, dalam Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh dinas/ instansi dan lembaga terkait mana dan seberapa jauh keterlibatan serta pengaruhnya ?
5. Apakah dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan sesuai aturan ?
6. Apakah terdapat program-program lain yang mendukung Kebijakan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal ?
7. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal di sekolah atau Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal ?
8. Apakah Bp/Ibu/Sdr mengetahui dan memahami Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah ? serta bagaimana manfaat dari program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah tersebut ?
9. Apakah ada tim pengembang/tim khusus dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal dan Bagaimana cara mengidentifikasi berbagai potensi sekolah dalam merumuskan program penguatan pendidikan karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal?
10. Apa saja nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam berbagai program penguatan pendidikan Di Kabupaten Tegal ?